

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Agustus 2018/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI / BADAN RISET DAN INOVASI
: NASIONAL
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
SUB UNIT KERJA : FAKULTAS HUKUM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SATINO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS JURUSAN FAKULTAS HUKUM**
3. NHK : **507446**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 50 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA BEET Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.700.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 81.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 642.200.000**III. HUTANG** Rp. 3.767.300**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 638.432.700



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **29 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.